

PENYULUHAN KEHUTANAN PARTISIPATIF

Participative Forestry Extension

M. Asar said Mahbub

Abstract

Participative extension is an extension model that involves farmers in the whole process of decision making.

Extension officers have several functions such as to strengthen the ability and the potency of the farmers, to improve their agricultural management, and to utilize the forest by involving them at the beginning stage of the study (from data collection, analysis, identification, planning, organization, implementation, monitoring, and evaluation, until the reporting activity).

To increase the outcome, we need to held the course for the forestry extension officers and the farmers as target groups regularly.

Keyword: *Extension, Farmers, Participative*

A. Pendahuluan

Pengelolaan kawasan hutan yang lestari disertai dengan peningkatan fungsi-fungsinya dapat terwujud, apabila dalam pelaksanaannya didukung oleh adanya partisipasi aktif oleh seluruh masyarakat dan instansi terkait lainnya.

Khusus mengenai peranserta aktif dari masyarakat, dapat terealisasi apabila mereka mengetahui dan sadar, serta peduli terhadap ekstensi kawasan hutan bagi dirinya, bagi bangsa dan bagi negaranya.

Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan upaya gerakan memasyarakatkan cinta hutan dan peduli lingkungan serta ekstensinya, melalui kegiatan penyuluhan kehutanan yang didukung oleh perencanaan penyuluhan yang mantap dan berkesinambungan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Penyuluhan Kehutanan tersebut, berbagai upaya telah dan akan dilakukan, antara lain:

penetapan berbagai ketentuan atau prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan para penyuluh kehutanan.

Masyarakat yang menjadi sasaran Penyuluhan Kehutanan diharapkan dapat berperilaku positif dan berpartisipasi aktif, mengembangkan diri baik dalam hal ilmu pengetahuan, kecakapan, sikap, dan motif tindakannya khususnya terhadap hutan, kehutanan dan lingkungan hidup pada umumnya.

Partisipasi masyarakat akan tumbuh apabila masyarakat dijadikan subjek pembangunan dalam artian dijadikan sebagai pihak yang berkepentingan dan pengambil keputusan dalam berbagai aspek pembangunan kehutanan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, pemanfaatan hasil serta berperan sebagai mitra pihak-pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi.

Untuk menciptakan kondisi partisipasi aktif masyarakat pada kegiatan pembangunan kehutanan diperlukan adanya gerakan penyuluhan kehutanan partisipatif. Diharapkan dari Penyuluhan Kehutanan yang partisipatif tersebut akan ter cipta suasana penyuluhan yang kondusif, karena antara masyarakat sebagai sasaran penyuluhan dan penyuluh kehutanan sebagai penyampai pesan, inovasi dan teknologi akan bekerja sama dan berperan serta.

B. Pengertian

Penyuluhan partisipatif adalah model penyuluhan yang melibatkan para petani pada keseluruhan proses pengambilan keputusan mulai dari pengumpulan dan analisis data, identifikasi masalah, analisa kendala dan penerapan, pemantauan dan evaluasi.

Peran penyuluh dalam hal ini adalah memperkuat kemampuan-kemampuan dan potensi para petani untuk memperbaiki usaha mereka dalam mengelola usaha tani dan memanfaatkan hutan.

Pendekatan penyuluhan partisipatif dapat dilakukan dengan petani secara perorangan maupun kelompok. Dalam pelaksanaannya, penyuluhan partisipatif ini diarahkan kepada masyarakat yang tingkat pengetahuannya telah maju. Sedangkan untuk masyarakat yang tingkat pengetahuannya rendah, penyuluhan dilaksanakan dengan pendekatan konvensional seperti sistem latihan dan kunjungan (LAKU)

Penyuluhan partisipatif terutama diterapkan pada penyuluh dengan materi-materi yang bersifat pengembangan teknologi terapan atau dalam upaya transformasi teknologi kepada petani.

C. Beberapa Prinsip Dasar Untuk Menyusun Strategi Pelaksanaan

1. Belajar dari Masyarakat

Hakekat kegiatan Penyuluhan Kehutanan menyebarluaskan adalah informasi yang berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas, pendapatan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat dari pemanfaatan hutan secara lestari. Hal ini dapat dipahami oleh masyarakat apabila terjadi komunikasi yang baik, kesalingpercayaan antara petani dan penyuluh, serta masyarakat menyadari bahwa mereka merupakan salah satu dari trilogi pemanfaatan hutan yaitu: petani, penyuluh/aparat dan hutan.

Pemanfaatan oleh masyarakat banyak menggunakan kearifan tradisional dan cara-cara yang memang sudah terpercayai dan teruji mampu menyelesaikan permasalahan dalam pemanfaatan lahan hutan oleh petani. Cara-cara dan kearifan tradisional tersebut dapat dijadikan pelajaran berharga oleh penyuluh. Penyuluh belajar dari masyarakat dan tidak melalui mengajari masyarakat.

2. Orang Luar (Peneliti, Penyuluh, Petugas) Sebagai Fasilitator Masyarakat Sebagai Pelaku

sikap rendah hati, mau belajar dari masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai nara sumber adalah langkah bijak dan arif yang selayaknya dianut oleh penyuluh. Penyuluh hanya bertindak sebagai fasilitator dengan memberikan arahan dan pandangan yang mengarah pada pengambilan keputusan

yang demokratis dan disepakati oleh semua pihak.

3. **Saling Belajar dan Berbagi Pengalaman**

Walaupun ada pengakuan atas pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat bukan berarti masyarakat selamanya benar dan dibiarkan tidak berubah. Demikian juga, pengetahuan modern yang diperkenalkan oleh orang luar tidak selalu dapat memecahkan masalah mereka. Oleh karena itu antara pengalaman dan pengetahuan orang luar saling melengkapi dan sama pentingnya.

4. **Informal**

Karena kegiatan Penyuluhan Kehutanan adalah pendidikan non formal yang tidak terikat pada absen, kurikulum dan tempat, maka kegiatan Penyuluhan Kehutanan dapat dilakukan di mana saja, sifatnya luwes, terbuka dan tidak memaksa.

Situasi seperti ini akan menimbulkan hubungan yang akrab sehingga orang luar (penyuluh) akan berproses masuk dan diterima sebagai anggota kelompok diskusi.

Prinsip utama yang harus dipegang oleh Penyuluhan Kehutanan menyikapi sistem informal ini adalah: pertemuan yang dilakukan harus tepat waktunya dan tepat tempatnya.

5. **Keterlibatan Semua Anggota Kelompok Masyarakat**

Kekeliruan yang sering dibuat adalah menganggap bahwa pimpinan formal, tokoh-tokoh masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat dapat mewakili seluruh masyarakat. Kekeliruan

seperti itu dapat melahirkan program yang hanya memenuhi kepentingan suatu golongan tertentu dan tidak didukung oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu, untuk mencegah bias dan memperoleh dukungan masyarakat luas, maka dalam kegiatan PRA harus melibatkan semua golongan dan mewakili berbagai wilayah desa.

Pelibatan ini juga harus menggambarkan apa tugas mereka (hak dan kewajibannya) secara rinci dan diasosiasikan kepada masyarakat.

6. **Menghargai Perbedaan**

Kegiatan penyuluhan partisipatif selalu mencoba melihat sejumlah variasi informasi dan masalah, bukan memberikan hasil atau nilai rata-rata. Variasi informasi dan masalah ini kemudian diorganisir dan diurutkan prioritasnya oleh masyarakat sendiri sebagai pemiliknya.

7. **Pengujian dan Pemeriksaan Ulang**

Keseluruhan rencana kegiatan Penyuluhan Kehutanan diperiksa dan diuji kebenarannya dengan menyandarkan pada: penggunaan variasi dan berbagai teknik partisipatif, menggali berbagai jenis sumber informasi dan tim penilai yang multidisiplin.

8. **Mengoptimalkan Hasil**

Pelaksanaan kegiatan PRA memerlukan waktu, tenaga, nara sumber, pelaksan yang terampil dan partisipasi warga masyarakat yang keseluruhannya memerlukan dana/biaya. Pengoptimalan dilakukan dengan mengkaji hal-hal yang dianggap penting dan mendekati kebenaran.

9. Belajar dari Kesalahan

Pengalaman adalah guru yang paling baik dan kesalahan adalah guru yang paling bijak merupakan prinsip arif yang perlu dilakoni oleh masyarakat dan penyuluh. Karena dari pengalaman dan kesalahan, penyuluh dan masyarakat akan menyadari kekurangan dan kemampuannya.

10. Orientasi Praktis

Masyarakat butuh inovasi yang praktis, ekonomis dan mudah dilaksanakan. Mereka butuh pengetahuan yang optimal, bukan semua informasi. Prinsipnya adalah perkiraan yang tepat akan lebih baik daripada kesimpulan yang tepat tetapi salah.

11. Berkesinambungan

Penyuluhan Kehutanan bersifat terus-menerus, Karena itu dinamika yang terjadi harus terus dipantau dan dikembangkan sesuai dengan perubahan dan perkembangan baru di dalam masyarakat.

D. Pengorganisasian Pelaksanaan

Untuk melakukan pengorganisasian penyuluhan partisipatif, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain:

1. Adanya Penyuluh Kehutanan yang profesional untuk melaksanakan tugas-tugas di lapangan secara berkala.
2. Terdapatnya pelayanan penyuluhan di berbagai tingkatan guna memudahkan koordinasi dalam pendekatan hubungan antara pusat-pusat penelitian atau sumber inovasi yang lain yang pelayanan

penyuluhan yang akan diorganisir.

3. Terjalannya hubungan yang baik dengan pusat-pusat penelitian untuk mendapatkan solusi permasalahan yang dihadapi petani di dalam memanfaatkan hutan.
4. Adanya sistem kerja Penyuluh Kehutanan yang ditetapkan sehingga penerapan inovasi dapat dilaksanakan oleh petani secara berkesinambungan.
5. Adanya hubungan koordinasi dengan kegiatan-kegiatan bidang penyuluhan yang lain. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat adanya kemungkinan berlangsung suatu kegiatan penyuluhan pada waktu dan tempat yang sama bagi petani oleh beberapa unit kegiatan penyuluhan. Agar program penyuluhan dapat saling diketahui oleh instansi atau unit kerja penyuluhan yang terdapat di suatu desa atau daerah, maka perlu adanya komunikasi antar unit kerja penyuluhan yang satu dengan unit kerja penyuluhan yang lain.
6. Adanya sistem monitoring yang memadai untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan, kendala-kendala serta informasi lainnya.
7. Adanya organisasi kelompok tani yang efisien dan efektif.

E. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan partisipatif meliputi empat tahap yaitu:

1. **Membuat rancangan teknologi**, Dalam membuat rancangan teknologi harus memperhatikan hal-hal seperti: a) masalah yang mendasar, yang jika dipecahkan maka lain pun tidak terpecahkan, b) masalah sebenarnya luas dan dirasakan banyak orang, c) masalah yang bias dipecahkan dengan sumber daya terjangkau
2. **Penjadwalan dan pembagian tugas**, Dalam pelaksanaan tugas, sedapat mungkin diarahkan pada kelompok sasaran untuk diberi tugas dan tanggung jawab yang besar, sehingga penyuluh hanya berperan sebagai fasilitator saja.
3. **Pembinaan**, Selama model dan teknik penyuluhan sedang dibangun atau sedang berlangsung perlu diamati secara seksama dan diberikan petunjuk untuk kelancaran penyelenggaraan penyuluhan.

F. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan

Perkembangan atau kemajuan kegiatan Penyuluhan Kehutanan partisipatif secara berkala dipantau Penyuluh Kehutanan atau atasan penyuluh. Setiap masalah yang timbul dibahas bersama dengan kelompok tani untuk mencari solusi.

Kegiatan evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara rencana, target serta realisasi yang ada

yang meliputi: tahap-tahap kegiatan, penggunaan teknologi, pencapaian target, partisipasi anggota kelompok serta dampak pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pelaporan dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan secara berkala dengan mencantumkan hal-hal: suasana partisipatif dalam kelompok sewaktu melaksanakan pekerjaan, gambaran pelaksanaan fisik lapangan serta perhatian, minat anggota masyarakat di luar kelompok terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

G. Penutup

Melalui upaya penyuluhan kehutanan yang partisipatif diharapkan program Penyuluhan Kehutanan akan menjadi tulang punggung dan ujung tombak keberhasilan kegiatan pembangunan kehutanan. Untuk itu diperlukan pelatihan-pelatihan, baik pelaku penyuluhan kehutanan maupun masyarakat sebagai kelompok sasaran

DAFTAR PUSTAKA

- Suhardiyono, L. 1992. Penyuluhan, Petunjuk Bagi Penyuluh Pertanian, Erlangga, Surabaya.
- Mardikanto, Totok, dkk. 1996. Penyuluhan Pembangunan Kehutanan, Kerjasama Pusat Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan RI dengan Fakultas Pertanian Universitas sebelas Maret Surakarta. Jakarta
- Mahbub, Asar Said, 2000. Metode Penyuluhan Kehutanan, Bahan Kuliah Metode Penyuluhan Kehutanan, Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin

Makassar, tidak
dipublikasikan.

Sekretariat Bantuan Penghijauan dan
Reboisasi Pusat. 1999.
Pedoman Pelaksanaan
Pengkajian Partisipatif
Penghijauan Desa, Jakarta.

Sekretariat Bantuan Penghijauan dan
Reboisasi Pusat. 1999.
Petunjuk Teknis Penyuluhan
Partisipatif, Jakarta.

Diterima 7 Oktober 2007

M. Asar said Mahbub

Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan,
Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin,
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telp./Fax. 0411-585917 Indonesia